

**KEBIJAKAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN
KEMISKINAN OLEH TIM KOORDINASI
PENANGGULANGAN KEMISKINAN (TKPK) DI
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2011-2012**

T. Mohd. Faisal

and

Drs. Erman M, M.Si

Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru

Email: tengkufaisal14@yahoo.com

CP : 083187251190

ABSTRACT

This study aims to determine the results acceleration of poverty reduction by the Coordinating Team for Poverty Reduction (TKPK) in Meranti Islands Regency year 2011-2012, and understanding the limiting factor in efforts to accelerate the poverty reduction. This study used qualitative methods. Data collection techniques in this study were interviews and documentation search, then described by means of descriptive. From the findings of the data obtained, policies issued TKPK Meranti Islands Regency in poverty reduction is determine priority areas and targets of poverty reduction interventions, Budgeting analyze poverty reduction programs, make poverty reduction strategy, monitoring of poverty reduction programs, and coordination in efforts to accelerate poverty reduction. Acceleration of poverty reduction strategies in Meranti Islands Regency as it has been by TNP2K is repair of social protection programs, improve access to basic services, empowerment of the poor, and creating inclusive development. In the implementation of poverty reduction programs in Meranti Islands Regency, There are several inhibiting factors such as Communication, Resources, disposition and bureaucratic structures.

Keywords: TKPK, Poverty reduction, Meranti Islands Regency

Pendahuluan

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan Kabupaten baru, hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis, yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009. Persoalan utama yang dihadapi Kabupaten Kepulauan Meranti dan juga merupakan persoalan yang dihadapi oleh Kabupaten lainnya adalah minimnya infrastruktur yang tersedia, baik yang berkaitan dengan usaha pembangunan ekonomi masyarakat seperti jalan, jembatan, dan pelabuhan, maupun infrastruktur pendukung pelaksanaan roda Pemerintahan seperti kantor-kantor Pemerintahan dan sarana-sarana penunjang lainnya. Kondisi seperti itu akan berimplikasi secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, minat berinvestasi dan juga berpengaruh terhadap dunia usaha lainnya.

Pertumbuhan ekonomi yang rendah, akan berpengaruh kepada kesejahteraan yang rendah atau bahkan tingginya angka kemiskinan. Seperti di Kabupaten Kepulauan Meranti, Keadaan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti jauh tertinggal dibandingkan dengan keadaan ekonomi Daerah lain di Provinsi Riau. Menurut TNP2K angka persentase kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan tertinggi di Provinsi Riau dan salah satu yg tertinggi di Indonesia.

Kabupaten Kepulauan Meranti bersama Kabupaten Pelalawan termasuk kedalam Daerah dengan tingkat kemiskinan di atas target penurunan tingkat kemiskinan Nasional dan Provinsi Riau untuk tahun 2010. Bahkan posisi tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan Meranti sangat tinggi yaitu sebesar 42.56% dibandingkan tingkat kemiskinan Kabupaten Pelalawan (14.51%) meskipun sama-sama masih di atas angka target penurunan Nasional (13.33%) maupun Provinsi Riau (8.65%). Pada tahun 2011, tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan Meranti masih berada pada kondisi buruk (34.53%) dibandingkan target penurunan tingkat kemiskinan oleh provinsi (8.17%) dan nasional (12.36%). Berdasarkan perkembangan tingkat kemiskinan 2010-2011, terjadi penurunan tingkat kemiskinan dari 42.56% di tahun 2010 menjadi 34.53 % di tahun 2011.

Berdasarkan data BPS Provinsi Riau, garis kemiskinan Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2010 adalah Rp. 330.327,00 per kapita per bulan sementara pada tahun 2011 garis kemiskinan mengalami peningkatan sebesar Rp. 358.617,00 per kapita per bulan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dalam dua tahun ini beban kebutuhan makanan dan non makanan minimal yang mesti dikeluarkan setiap individu di Kabupaten Kepulauan Meranti semakin meningkat. Penduduk dengan kemampuan pemenuhan kebutuhan hidupnya baik makanan maupun non makanan dibawah angka tersebut dapat dikategorikan kedalam penduduk miskin.

Upaya Pemerintah untuk percepatan penanggulangan kemiskinan adalah dengan dibentuknya suatu lembaga yaitu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). TNP2K adalah lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di

tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan. TNP2K dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan.

Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 juga mengamanatkan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota. Tim ini merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku-pemangku kepentingan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan di masing-masing tingkat Daerah yang bersangkutan. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja TKPK kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 42 tahun 2010.

Upaya Pemerintah untuk percepatan penanggulangan kemiskinan adalah dengan dibentuknya suatu lembaga yaitu Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). TNP2K adalah lembaga yang dibentuk sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan di tingkat pusat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan. TNP2K dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan kemiskinan.

Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 juga mengamanatkan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) di tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota. Tim ini merupakan tim lintas sektor dan lintas pemangku-pemangku kepentingan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan di masing-masing tingkat Daerah yang bersangkutan. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja TKPK kemudian diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 42 tahun 2010.

TKPK memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota), dan Mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Daerah (Provinsi, Kabupaten dan Kota) sesuai keputusan Tim Nasional. Tujuan dibentuknya TKPK adalah mensinergikan program Nasional dengan program yang dibuat oleh Daerah agar dapat menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinn Daerah (SPKD).

Proses kerja TKPK melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan, mulai dari penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinn Daerah (SPKD), penyusunan strategis SKPD, penyusunan Rancangan Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penyusunan reancangan kerja SKPD sampai dengan melakukan pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut atas program yang telah dilakukan.

Berdasarkan masalah diatas untuk itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Kebijakan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011-2012.**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana kebijakan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2011-2012 ?
2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2011-2012 ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan

1. Untuk mengetahui hasil pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2011-2012.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Kepulauan Meranti dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Manfaat

1. Sebagai bahan evaluasi bagi TKPK Kabupaten Kepulauan Meranti dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Bagi peneliti, untuk memperoleh informasi ilmiah mengenai kebijakan TKPK Kabupaten Kepulauan Meranti dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. Menambah bahan pustaka dalam Ilmu Pemerintahan dan dapat sebagai masukan bagi peneliti lain yang ingin menganalisa terhadap permasalahan yang sama.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode kualitatif, karena penulis ingin penelitian ini menghasilkan data secara tertulis dari abjek yang diamati atau diteliti secara alamiah. Pengertian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

Setelah data yang diperoleh terkumpul, lalu disusun dan diklasifikasikan berdasarkan tema dan fokus penelitiannya. Penganalisaan data dalam penelitian ini dengan cara deskriptif kualitatif, yaitu dengan cara memberikan gambaran secara umum dari penelitian yang menghasilkan data mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari variabel yang diteliti dan disajikan dengan uraian dan penjelasan berdasarkan data hasil penelitian.

Kebijakan dan Hambatan Percepatan Penanggulangan kemiskinan

1. Kebijakan TKPK dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti

Mengingat karakteristik kemiskinan yang bersifat multi dimensi, multi sektoral, dan multi priode, maka pemerintah perlu membangun sebuah koordinasi yang sangat solid dan bekerja dengan cepat dalam memenuhi upaya tersebut. Sebagaimana yang di amanatkan dalam Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, untuk meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Daerah, maka dibentuk TKPK untuk Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Kondisi kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan yang tertinggi di Provinsi Riau yaitu sebesar 34,53% di tahun 2011. Tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti disebabkan beberapa faktor. diantaranya pendidikan, kesehatan, minim infrastruktur, minim lapangan kerja dan faktor budaya.

Penanggulangan kemiskinan memerlukan upaya sistematis yang bersifat komprehensif. Hal ini untuk memastikan bahwa upaya tersebut akan mampu menyentuh setiap elemen masyarakat miskin. Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti maka diperlukan strategi sebagai berikut:

1.1. Menentukan Prioritas Target Bidang dan Intervensi Penanggulangan Kemiskinan

Dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti hal yang paling pertama dianalisis adalah target bidang dan intervensi penanggulangan kemiskinan. Untuk menentukan target bidang dan intervensi penanggulangan kemiskinan tentunya berdasarkan analisa Basis data terpadu yang di paparkan tim TKPK atau BPS Kabupaten Kepulauan Meranti.

Dalam proses percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti terdapat lima target bidang dalam penanggulangan kemiskinan, seperti pada tabel berikut:

a. Prioritas Target Bidang dan Intervensi bidang ketenagakerjaan

Berdasarkan paparan data tingkat pengangguran dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau tahun 2010, angka tingkat pengangguran Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 6,70%. Angka tersebut bisa dibilang cukup baik bagi pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam menyerap jumlah penduduknya yang menganggur karena berada di bawah rata-rata tingkat penurunan pengangguran Provinsi maupun Nasional. Namun terjadi peningkatan tingkat pengangguran yang sangat drastis pada tahun 2011, yaitu sebesar 7,87%.

Apabila disandingkan dengan jumlah penduduk di tahun yang sama, terjadi pertambahan penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti. Jadi dapat disimpulkan bahwa bertambahnya angka pengangguran disebabkan karena bertambahnya jumlah penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti. Maka Prioritas Target adalah menyediakan lapangan kerja dan berusaha karena ketersediaan lapangan kerja Kabupaten Kepulauan Meranti belum mampu menampung jumlah angkatan kerja yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berdasarkan data penduduk pekerja lapangan BPS Kabupaten Kepulauan Meranti, bahwa sebagian besar masyarakat kabupaten meranti bekerja di bidang pertanian, yaitu sebesar 52,95%. Maka untuk intervensi penyediaan lapangan kerja dan berusaha prioritasnya adalah di bidang pertanian. Selanjutnya TKPK menganalisa dengan data PPLS untuk menentukan prioritas daerah mana yang mendapatkan intervensi program penanggulangan kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan pekerja disektor pertanian.

b. Prioritas target bidang dan intervensi bidang Kesehatan

Pada bidang kesehatan, fokus utama Pemerintah Kabupaten Meranti adalah tenaga kesehatan seperti bidan dan dokter umum maupun spesialis. Berdasarkan data yang BPS Provinsi Riau, Pemerintah Kabupaten Meranti termasuk salah satu Kabupaten dengan angka kematian bayi yang cukup tinggi yaitu 56.08%. tingginya angka tersebut di sebabkan karena masih banyak ibu hamil yang mempercayai proses persalinan dengan bantuan tenaga non medis seperti dukun beranak. Namun hal ini juga tidak bisa disalahkan kepada masyarakat, karena apa bila melihat data rasio bidan per 10.000 penduduk, Kabupaten Meranti memang termasuk salah satu kabupaten dengan jumlah rasio bidan terendah.

Tidak hanya tenaga bidan, Kabupaten Kepulauan Meranti juga merupakan Kabupaten dengan tingkat keluhan kesehatan tertinggi diantara kabupaten-kabupaten di provinsi Riau, yakni sebesar 37,58%. Faktor tingginya tingkat keluhan kesehatan dikarenakan rendahnya ekonomi masyarakat untuk pergi berobat, yang kedua jarak tempuh untuk menuju pusat pelayanan kesehatan itu sendiri dan yang terakhir adalah jumlah tenaga kesehatan seperti dokter/mantri juga sangat minim, hal itu dapat dilihat dari jumlah rasio dokter per 100.000 penduduk di kabupaten Kepulauan Meranti yang sebesar 11,66%.

Prioritas intervensi dalam bidang kesehatan di Kabupaten Meranti yang pertama tentunya adalah penurunan angka kematian bayi dengan intervensi pada jumlah tenaga bidan dan tenaga penyuluhan gizi untuk ibu hamil dan balita. Kedua, yang harus diprioritaskan adalah jumlah tenaga dokter atau mantri untuk mengurai jumlah keluhan kesehatan. Selain itu diperlukan juga tenaga penyuluhan kesehatan agar kesadaran masyarakat dalam menggunakan tenaga kesehatan yang disediakan. Dan prioritas yang terakhir adalah dengan pertimbangan jumlah penduduk maka perlu adanya penambahan jumlah puskesmas terutama untuk kecamatan yang baru dimekarkan.

c. Prioritas target bidang dan intervensi bidang Pendidikan

Berdasarkan angka putus sekolah pada perbandingan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Riau, angka putus sekolah Kabupaten Kepulauan Meranti masih sangat tinggi pada tahun 2011 baik di tingkat SD, SMP maupun SMA. Kondisi tersebut semakin diperkuat dengan angka partisipasi kasar yang peningkatannya masih jauh dari target pencapaian Provinsi maupun nasional.

Prioritas intervensi di bidang pendidikan adalah penambahan tenaga pengajar. Jumlah rasio guru di Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan yang terendah, hal ini juga turut berpengaruh terhadap tingginya angka putus sekolah. Kemudian ada sekolah yang belum mampu di jangkau oleh peserta didik yang bisa saja akses untuk menuju ke sekolah tidak memadai. Hal ini perlu dilakukan penambahan sekolah terutama untuk kecamatan yang baru dimekarkan. Dan yang terakhir adalah adanya biaya-biaya yang mesti di tanggung siswa selama bersekolah. Hal ini juga turut memicu angka putus sekolah terutama untuk siswa miskin.

d. Prioritas target bidang dan intervensi bidang Prasarana Dasar

Kebutuhan Prasarana dasar yang layak oleh sebagian besar penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti sangatlah dirasa perlu mengingat kelayakan prasarana dasar baik untuk rumah tangga maupun komunitas (masyarakat desa) merupakan salah satu dari indikator kemiskinan. Berdasarkan data yang di dapat dari TKPK Kabupaten Kepulauan Meranti, jumlah rumah tangga yang mempunyai sanitasi layak masih sangat sedikit yaitu sebesar 24.66%. hal ini dikarenakan masih banyak rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Meranti terutama yang berada di daerah pesisir pulau dan juga pinggiran sungai belum memiliki tempat untuk keperluan mandi, mencuci dan buang air besar dikarenakan kebiasaan yang sudah turun temurun.

Untuk prasarana dan sarana air minum yang layak, Kabupaten Kepulauan Meranti sudah cukup baik. Namun sekalipun dalam kepemilikan air minum yang layak, sebagian besar masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti masih memanfaatkan air hujan dan sumber mata air di kawasan hutan yang dikategorikan sebagai sumber air yang tidak terlindungi dan belum dapat dinyatakan bebas dari penyakit.

Berdasarkan perbandingan data antar wilayah kabupaten/kota Provinsi Riau untuk proporsi Rumah Tangga dengan Akses Listrik, Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami defisit suplai listrik untuk Rumah Tangga. Hal ini dikarenakan kondisi geografi Kabupaten Kepulauan Meranti yang terdiri dari pulau-pulau yang dihubungkan dengan perairan sehingga memerlukan pendekatan pembangunan prasarana dan sarana kelistrikan yang berbeda dengan kabupaten-kabupaten yang memiliki kondisi geografi daratan.

Upaya membangun prasarana jaringan jalan dan jembatan agar dapat dilewati roda empat untuk kawasan perdesaan di Kabupaten Kepulauan Meranti masih sangat rendah, yakni 35.21%. indikasinya sebagian besar perdesaan belum dapat ditempuh dengan layak oleh kendaraan roda empat, selain faktor geografi yang kepulauan juga kondisi pembangunan yang baru beberapa tahun Kabupaten Kepulauan Meranti dimekarkan sehingga masih banyak desa-desa yang kondisi

jalannya baru dapat dilewati oleh roda dua saja. Hal ini sejalan dengan data yang diperoleh dari dinas PU Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2010, masih ada 23.53% jalan jenis base dan 73.44% kondisi jalan meranti dalam keadaan rusak baik itu rusak ringan maupun rusak berat.

e. Prioritas target bidang dan intervensi bidang Ketahanan Pangan

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas antara tahun 2010-2011 dapat mengimbangi meningkatnya inflasi di tahun yang sama. Hal ini dapat dilihat terjadinya penurunan perkembangan harga bahan kebutuhan pokok terutama beras sebagai indikator bahan makanan utama masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti. Sedangkan tingkat pertumbuhan ekonomi tanpa migas Kabupaten Kepulauan Meranti sudah cukup membaik melebihi target pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau. Jika dengan perkembangan perekonomian makro yang sangat bagus, maka angka kemiskinan yang cukup besar dapat secara alamiah turun di tahun-tahun berikutnya.

1.2. Menganalisis Penganggaran untuk program Penanggulangan

Kemiskinan

Dalam penganggaran program penanggulang kemiskinan, TKPK diharapkan mampu mendorong proses perencanaan dan penganggaran sehingga menghasilkan anggaran yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan. Anggaran Pemerintah memegang peranan penting dalam penanggulangan kemiskinan. Alokasi anggaran seharusnya mencerminkan rangkaian prioritas sektoral maupun prioritas wilayah yang dirumuskan dalam analisis sebelumnya. Analisis distribusi anggaran ini akan menunjukkan apakah anggaran Pemerintah daerah telah mencerminkan prioritas.

Struktur Pendapatan Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2010-2011 menunjukkan porsi pendapatan yang berasal dari transfer Pemerintah pusat yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus masih mendominasi kondisi pendapatan Pemerintah selama tiga tahun ini.

Analisis anggaran dapat dilakukan dua tingkat. Pertama adalah analisis yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melihat kesesuaian alokasi anggaran daerahnya, terkkait dengan prioritas yang di yang telah dirumuskan sebelumnya. Analisis anggaran kedua adalah analisis yang dilakukan oleh pemerintah daerah satu tingkat di atasnya (TKPK Provinsi). Analisis anggaran perlu pula dilakukan Pemerintah Provinsi untuk melihat kesesuaian prioritas dan anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di wilayahnya. Prioritas didasarkan atas analisis Priorotas wilayah.

1.3. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Meranti

a. Memperbaiki Program Perlindungan Sosial

Sistem perlindungan sosial dimaksud untuk membantu individu dan masyarakat menghadapi goncangan-goncangan dalam hidup, seperti jatuh sakit, kematian anggota keluarga, kehilangan pekerjaan, tertimpa bencana dan

sebagainya. Sistem perlindungan sosial yang efektif akan mengantisipasi agar seseorang atau masyarakat yang mengalami guncangan tidak sampai jatuh miskin.

Penerapan strategi ini antara lain didasari satu fakta besarnya jumlah masyarakat yang rentan kedalam kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Salah satu contoh meningkatnya angka kepala rumah tangga perempuan terutama diatas usia 60 tahun keatas pada tahun 2011 di Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. Meningkatkan Akses Terhadap Pelayanan Dasar

Peningkatan akses terhadap pelayanan dasar akan berperan dalam meningkatkan kualitas modal manusia terutama dikalangan masyarakat miskin. Memperbaiki akses masyarakat miskin terutama pada pelayanan pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Kepulauan Meranti akan membantu mengurangi biaya yang harus dikeluarkan masyarakat miskin.

Salah satu bentuk peningkatan akses pelayanan dasar masyarakat miskin adalah peningkatan akses pendidikan. Pendidikan harus diutamakan mengingat dalam jangka panjang iya merupakan cara yang efektif bagi masyarakat miskin untuk keluar dari garis kemiskinan. Sebaliknya, kesenjangan pelayanan pendidikan antara masyarakat miskin dan tidak miskin akan melestarikan kemiskinan melalui pewarisan kemiskinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak dari keluarga miskin yang tidak dapat mencapai tingkat pendidikan yang mencukupi sangat besar kemungkinan untuk tetap miskin sepanjang hidupnya.

c. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Miskin

Memperdayakan masyarakat miskin sangat penting untuk meningkatkan efektifitas dan keberlanjutan penanggulangan kemiskinan agar masyarakat/ individu miskin dapat berupaya sendiri untuk keluar dari kemiskinan dan tidak jatuh lagi kedalam kemiskinan. Pentingnya pelaksanaan strategi ini menimbang kemiskinan juga biasanya disebabkan oleh ke tidak adilan dan struktur ekonomi yang tidak berpihak kepada kaum miskin. Hal ini menyebabkan output pertumbuhan tidak terdistribusi secara merata kepada semua kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat miskin yang secara politik, sosial, dan ekonomi tidak berdaya, jarang menikmati pembangunan tersebut secara proporsional.

Dengan memerhatikan pemberdayaan masyarakat dapat didorong upaya penanggulangan kemiskinan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan Daerah masing-masing. Sehingga, program yang disusun memiliki korelasi dengan kebutuhan masyarakat miskin. Pemerdayaan kelompok masyarakat miskin pada hakikatnya berusaha meningkatkan taraf hidup penduduk miskin tanpa membuat mereka tergantung pada program bantuan.

d. Menciptakan Pembangunan Yang Inklusif

Pembangunan mengikutsertakan sekaligus memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat, karena kemiskinan hanya dapat berkurang dalam suatu perekonomian yang tumbuh secara dinamis. Pertumbuhan harus mampu

menumbuhkan lapangan kerja produktif dalam jumlah yang besar. Pada gilirannya akan ada peningkatan pendapatan mayoritas penduduk, peningkatan taraf hidup, dan mengurangi angka kemiskinan. Paradikma pembangunan inklusif mengandung arti lebih dari sekedar melihat hasil pembangunan secara agregat. Artinya, indikator-indikator pembangunan seperti peningkatan pendapatan per kapita tidak hanya di evaluasi secara agregat, tetapi juga berdasarkan kelompok dalam penduduk berdasarkan pendapatan, daerah, sektor, gender dan lainnya

Paradikma pembangunan inklusif mengandung arti lebih dari sekedar melihat hasil pembangunan secara agregat. Artinya, indikator-indikator pembangunan seperti peningkatan pendapatan per kapita tidak hanya di evaluasi secara agregat, tetapi juga berdasarkan kelompok dalam penduduk berdasarkan pendapatan, daerah, sektor, gender dan lainnya

1.4. Pemantauan Program Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kep.Meranti

Proses pemantauan akan menghasilkan informasi berupa analisis kebutuhan dan ketersediaan sumber daya, analisis indikator kinerja kunci, dan implementasi program. Hasil pemantauan dapat juga digunakan sebagai dasar untuk mengukur kuantitas, kualitas dan penargetan keluaran (*output*). Informasi tersebut juga membantu TKPK Kabupaten Kepulauan Meranti dalam memahami sebab keberhasilan, kelemahan maupun kegagalan program.

Pemantauan akan mendukung menentukan intervensi kebijakan Daerah untuk mendukung efektivitas program yang sedang berjalan. Informasi yang didapatkan sebagai hasil pemantauan membantu pemerintah dengan menyediakan bukti-bukti yang berkaitan dengan efektivitas pelayanan dan program, baik dari segi biaya maupun hasil/dampak. Pemantauan membantu Pemerintah dalam pengelolaan dan pengendalian kegiatan pada tingkat sektor, program dan proyek, dalam mengidentifikasi permasalahan dan kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan program. Manfaat lain yang tak kalah penting dari pemantauan adalah meningkatkan transparansi dan menerapkan prinsip akuntabilitas publik. Informasi hasil pemantauan menyediakan bukti dasar tentang bagaimana pemerintah mengelola sumber daya publik sebagai pertanggungjawaban terhadap masyarakat.

Dalam kendali TKPK, pemantauan yang dilakukan oleh SKPD terkait diharapkan dapat diperoleh secara berkala informasi Dalam melakukan pemantauan, untuk memperoleh informasi melalui tentang pelaksanaan program dari kunjungan lapangan dapat dilakukan beberapa cara, seperti wawancara dengan narasumber kunci maupun dengan kelompok masyarakat penerima program, diskusi kelompok terfokus, observasi langsung, dan survey kecil.

1.5. Melakukan Koordinasi Program Penanggulangan Kemiskinan

Pengkoordinasian program penanggulangan kemiskinan sangat penting dilakukan dalam percepatan penanggulangan kemiskinan. Karena dengan adanya program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan secara nasional dan membutuhkan kerja sama antar sektor. Kemudian adanya program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang merupakan pelengkap bagi program Nasional atau

merupakan program untuk menjawab permasalahan kemiskinan spesifik di Kabupaten Kepulauan Meranti dan berbagai program yang telah dibuat oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah besar kemungkinan mempunyai sasaran yang sama. Program-program yang dibuat dapat pula melibatkan beberapa sektor dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, koordinasi pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan menjadi kunci keberhasilan untuk mencapai tujuan. Koordinasi dimaksudkan agar berbagai program mempunyai sinergi sehingga menjadi lebih efektif, termasuk memastikan program dijalankan sesuai desain.

Pemahaman terhadap latar belakang, tujuan, dan sasaran program menjadi sangat penting untuk dapat melakukan sinergi dari berbagai upaya penanggulangan kemiskinan. TKPK Kabupaten Kepulauan Meranti diharapkan mampu untuk melakukan koordinasi berbagai program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Faktor penghambat dalam Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti

2.1. Komunikasi

Komunikasi dibutuhkan oleh setiap pelaksana kebijakan untuk mengetahui apa yang harus mereka lakukan karena Komunikasi berpengaruh besar terhadap berhasilnya implementasi kebijakan. Komunikasi yang baik akan melancarkan penerapan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan pada saat kebijakan itu dibuat. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. Dalam proses percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti faktor komunikasi menjadi salah satu penghambat.

2.2. Sumber daya

Sumber daya merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Sumber daya dapat berwujud sumber daya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumber daya finansial. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya, sedangkan kuantitas berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran.

Dalam proses percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti, salah satu permasalahan dalam sumber daya adalah permasalahan staf. Namun penambahan jumlah staf/pegawai tidak cukup menyelesaikan permasalahan implementasi kebijakan di Kabupaten Kepulauan Meranti, tetapi juga diperlukan sebuah kecukupan dan kesesuaian staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan dalam implementasi kebijakan.

2.3. Disposisi

Diposisi merupakan sikap atau komitmen dari pelaksana terhadap kebijakan yang dibuat. Dari hasil penelitian, komitmen TKPK Kabupaten Kepulauan Meranti dalam percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti masih dinilai kurang, meskipun telah menindaklanjuti Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dengan membentuk TKPK untuk Kabupaten Kepulauan Meranti. Namun pelaksanaan tugas dan fungsi TKPK Kabupaten Kepulauan Meranti belum optimal dan efisien. Kesimpulan tersebut diambil dikarenakan TKPK Kabupaten Kepulauan Meranti belum mempunyai dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD).

2.4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi di Kabupaten Kepulauan Meranti belum sepenuhnya tertata dengan baik, penempatan aparatur belum sesuai dengan latar belakang dan tupoksi. Namun, sebagai Kabupaten yang relatif baru, penataan birokrasi dan kelembagaan pemerintah relatif memungkinkan untuk ditata dengan tepat guna. Penataan Birokrasi dan Struktur Organisasi Tata Kelola (SOTK) menjadi sebuah harapan bagi terwujudnya kemampuan pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam mengelola kegiatan terutama dalam Penanggulangan kemiskinan.

Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Sebagai tahap akhir penulisan sekaligus untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, maka berdasarkan hasil pembahasan keseluruhan indikator penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti disebabkan beberapa faktor, diantaranya Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Budaya. Dalam pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2011-2012 dapat dikatakan baik meskipun belum optimal dan efisien, hal ini terbukti dengan penurunan tingkat kemiskinan Kabupaten Kepulauan Meranti yang awalnya 42,56% pada tahun 2010 menjadi 34,53% pada tahun 2011. Kebijakan percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang dibuat TKPK Kabupaten Kepulauan Meranti dapat dikatakan baik dan sesuai dengan instrumen penanggulangan kemiskinan yang ditetapkan TNP2K. Namun dalam mengintervensi target bidang penanggulangan, TKPK Kabupaten Kepulauan Meranti hanya secara menganalisa dari hasil pemantauan program yang dilakukan, kemudian diserahkan kepada SKPD terkait. TKPK Kabupaten Kepulauan Meranti tidak merumuskan dan membuat dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), seperti yang diamanatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 42 tahun 2010.
2. Terdapat beberapa faktor penghambat dalam upaya percepatan Penanggulangan kemiskinan yang dilakukan TKPK Kabupaten Kepulauan Meranti. misalnya masalah komunikasi yang disebabkan letak geografi Kabupaten Meranti yang berpulau-pulau, jumlah staf dan fasilitas penyelenggara Pemerintahan yang masih minim, belum adanya dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), dan struktur Birokrasi

di Kabupaten Kepulauan Meranti yang masih belum tertata dengan baik. Kesemua permasalahan tersebut tentunya dapat mempengaruhi kebijakan yang ditetapkan TKPK Kabupaten Kepulauan Meranti dalam upaya Percepatan penanggulangan kemiskinan.

2. Saran

Setelah dilakukan analisis dan kesimpulan pada bagian sebelumnya, maka penulis akan mengemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti harus Merancang Instrumen Hukum untuk Rencana aksi Daerah dalam penanggulangan kemiskinan, seperti Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. TKPK Kabupaten Kepulauan Meranti harus menyusun Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) untuk penguatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Meranti.
3. TKPK Kabupaten Kepulauan Meranti diharapkan mampu meningkatkan koordinasi baik dengan TKPK Provinsi maupun dengan TNP2K dan mendorong proses perencanaan dan penganggaran sehingga menghasilkan anggaran yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti.
4. TKPK Kabupaten Meranti harus menghindari adanya bias Kepentingan dalam program penanggulangan kemiskinan. Proses pengumpulan data dan analisis data harus bersifat objektif agar setiap produk kebijakan dapat diimplementasikan sesuai dengan substansi dari produk kebijakan tersebut.
5. Memperkuat Keberpihakan pihak swasta dalam penanggulangan kemiskinan dengan program-program tanggung jawab sosial perusahaan.
6. Meminta rekomendasi TNP2K agar Kabupaten Kepulauan Meranti dapat masuk kedalam daerah tertinggal.

DAFTAR PUSTAKA

- Aneta, Asna. 2010. *Implementasi Kebijakan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2K) Di Kota Gorontalo*. Jurnal Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo. Vol 1 (1). P 56.
- Brantas. 2009. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Darise, Nurlan. 2008. *Pengelolaan Keuangan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)*. Jakarta : PT Indeks.
- Hamzah, Asiah. 2012. *Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan dan Kelaparan di Indonesia: Realita dan Pembelajaran*. Jurnal Bagian Administrasi dan Kebijakan kesehatan, FKM Unhas. Vol. 1 No 1.
- HAW. Widjaja. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Pustaka.
- Henandarto, Itjok. 2009. *Pelaksanaan kebijakan penyusunan rencana kerja anggaran Kementerian Negara / Lembaga dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja di Departemen Keuangan, Tesis*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Kanisius. Tangkilisan, Hessel Nogi. S. (2004). *Kebijakan dan Manajemen: Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Lukman Offset.
- Ndraha, Talizidun. 2003. *KYBERNOLOGY (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : Rineka cipta.
- Ruhana, Faria dan Yesi yuliana. 2010. *Implementasi kurikulum tingkat Satuan Pendidikan*. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, IPDN. Vol 10 (2). p 149-150.
- TKPK. 2012. *Laporan Pelaksanaan Penanggulangan daerah*. Selatpanjang: TKPK Kabupaten Kepulauan Meranti.
- TNP2K. 2011. *Buku Panduan Penanggulangan Kemiskinan*, Jakarta: TNP2K
- Usman, Husnaini & Akbar, Purnomo Setiady. 2009. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Widodo, Djoko. 2011. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Bayu Media.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.

_____, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Tim koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi/Kota.

_____, Keputusan Bupati Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 18.3 tahun 2012. Tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2012.

Lainnya

TNP2K, 2013. *Strategi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan*, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), <http://tnp2k.go.id/>, diakses 19 Febuari 2013.

Jaya, M. Aziz Satriya. *Resume buku Implementing Public Policy*, (George C Edwards III), <http://ratuagung78.blogspot.com/>, diakses 30 April 2013.

FNEWS. Kemiskinan masih melilit Suku Akit. <http://formatnews.com>. diakses 7 September 2013.

Yoesz, Rika. Suku Akit, di tapal batas Negeri Malaysia. <http://kompasasia.com>. diakses 7 September 2013.

RiauPos, Meranti berbenah menuju MDGs. <http://Riauapos.com> diakses 7 September 2013.